

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LUBUK
TERAP KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUDDASIR

NPM : 097310179

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muddasir
NPM : 097310179
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa
Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan
Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian kofrehensif.

Pekanbaru, 9 April, 2016

Pembimbing I

Dr. H. Syafhendry., M.Si

Pembimbing II

Yendri Nazir., S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

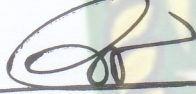
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muddasir
NPM : 097310179
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa
Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan
Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

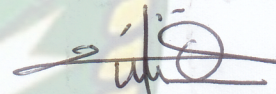
Pekanbaru, 20 April, 2016

Ketua



Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Sekretaris



Khotami, S.Sos, M.Si
Anggota

Drs. Zaini Ali., M.Si
Anggota

Dr. H. Syahendry., M.Si
Anggota

Yendri nazir., S.Sos, M.Si

Mengetahui
Pembantu Dekan I,



Dr. H. Moris Adidi Yogya., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muddasir
NPM : 097310179
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa
Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan
Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukkan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 1 April, 2017

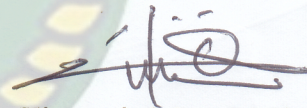
An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua



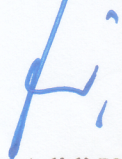
Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



Khotami, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui

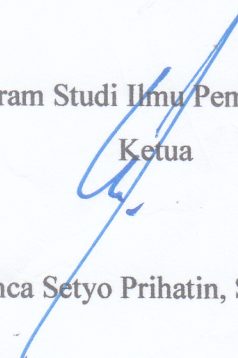
Pembantu Dekan I,



Dr. H. Moris Adidi Yogya., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 418/UIR-FS/KPTS/2016
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muddasir
NPM	: 097310179
Jurusan/P.Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Struktur Tim :

1. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Khotami, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 April 2016
Dekan,


T. Rafizal AR., S.Sos., M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Jurusan.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 418/UIR-Fs/Kpts/2016 tanggal 19 April 2016 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 20 April 2016 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muddasir
 NPM : 097310179
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
 Nilai Ujian : Angka : " 77,3 " ; Huruf : " B "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / ~~Tidak Lulus~~ / ~~Ditunda~~
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Ketua	1. 
2.	Khotami, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 20 April 2016

Dekan,


 T. Rafiza AR., S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran tuhan yang maha esa yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: "Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan". Skripsi ini tentunya diajukan untuk memenuhi salah satu memperoleh gelar Sarjana Strata 1 ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau pekanbaru.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof.Dr.H.Detri Karya, SE.,MA.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak T.Rafizal AR.,S.Sos, M.Si
3. Bapak Dr.Syafhendry, M.Si yang bertindak sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si yang bertindak sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Bapak Yendri Nazir,S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan kepada adik dan kaka penulis yang selalu mengingatkan penulis, terima kasih semoga dalam lingkungannya.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta perpustakaan Universitas Islam Riau
9. Dan juga tidak lupa buat teman-teman angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga kita semua sukses, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa,amin.

Pekanbaru, 2 Januari
2016

Penulis Ttd

Muddasir

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	22
B. Kerangka Pikir.....	34
C. Konsep Operasional	36
D. Operasional Variabel.....	37
E. Teknik Pengukuran	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	46

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pelalawan	47
B. Sejarah Singkat Lubuk Terap	49
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lubuk Terap.....	50
D. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Lubuk Terap	51
E. Sumber Daya Organisasi	56

BAB V PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	57
B. Hasil dan Pembahasan.....	59
C. Faktor Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	75

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 : Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap 2013. ...	10
Tabel II.1 : Obrasinal Variabel Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Pelalawan	34
Tabel III.1 : Jumlah dan Sampel Penelihan Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Pelalawan	39
Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian	42
Tabel IV.1 : Daftar Sumber Daya Pemerintah Desa Lubuk Terap	52
Tabel V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden	54
Tabel V.2 : Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat umur	55
Tabel V.2 : Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Tabel V.4 : Distrubusi Jawaban Responden Penelitian Mengenai dan Mengodentifikasi Tujuan Program.....	61
Tabel V.5 : Distrubusi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Analisis Terhadap Masalah	65
Tabel V.6 Distrubusi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Deskripsi Kegiatan	67
Tabel V.7 Distrubusi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Pengukuran Terhadap Tingkat Perubahan	70
Tabel V.8 Rekapitulasi jawaban responden penelitian mengenai Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Pelalawan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Pelalawan	31
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Lubuk Terap .	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner penelitian.....	80
2. Wawancara Penelitian	86
3. Daftar Tally.....	89
4. Surat rekomendasi dari Badan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tentang Pelaksanaan Riset/prariset dan pengumpulan data bahan penelitian.....	90
5. Surat rekomendasi dari Kesatuan Bangsa dan Politik dan melindungi masyarakat Kabupaten Pelalawan tentang pelaksanaan kegiatan riset/prariset untuk pengumpulan bahan skripsi.....	91
6. Surat keputusan dekan fisipol UIR tentang penetapan pembimbing penulisan skripsi.....	92
7. Dokumentasi hasil penelitian.....	93
8. Rincian alokasi dana desa lubuk terap.....	96

EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
LUBUK TERAP KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN

Abstrak

Muddasir

Kata Kunci : Evaluasi,Alokasi Dana Desa

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintah yang paling bawah dan memiliki pemerintahannya sendiri yang berdasarkan kebudayaan atau kearifan lokal, dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya selain didukung dengan dana yaitu APBD dan bantuan seperti Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan yang dalam penggunaan Alokasi Dana Desanya lebih banyak pada operasional dan honor perangkat desa serta bantuan dana kepada lembaga yang ada di desa, sehingga menjadi suatu fenomena untuk dinilai pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif Kuantitatif dengan alat pengumpulan yaitu kuisioner, wawancara dan observasi, setelah melakukan penyebaran kuisioner dan pengolahan data, wawancara dengan kepala Desa serta observasi terhadap hasil-hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam kategori cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi dan ketidakmaupun pemerintah desa untuk lebih membuat rincian tentang kegiatan penggunaan dana ADD.

*EVALUATION OF THE USE FUND ALLOCATION OF VILLAGE
IN DISTRICT BANDAR LUBUK TERAP PETALANGAN
PELALAWAN*

Abstract

Maddasir

Keywords: Evaluation the Village Fund Allocation

Village government is the level of government most down and has its own government that is based on the culture of the village or local knowledge, the organization of village administration, will surely be supported by resource executor is also supported by funds that the budget and the help of such allocation of village funds provided by pemerintahan central and regional particularly in the village of Lubuk Terap District of Bandar Petalangan that he use of his village funds allocation more on operational and village perangkat fees and financial assistance to the institute of the existing village, so it becomes a phenomenon for the value of how implementation. This type of research digunakan dalam this research is descriptive quantitative with collection tools were questionnaires, interviews and observations after distributing questionnaires and data processing, interview with the head of the village as well as the observation of the results of activities can be concluded that the use of the Village Fund Allocation in Lubuk Terap District of Bandar Petalangan Pelalawan in the category quite well, but in practice there are still some barriers such as lack of socialization and inequalities as well as the village administration for more details on the activities making use of the funds ADD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi. Dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut, maka UUD 145 harus bertumbuh kembang sesuai dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga kehidupan masyarakat mendapatkan jaminan berdasarkan hukum. (manan2003;49).

Tujuan utama berikutnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomisasi adalah merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintahan dalam pengelolaan daerahnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dinegara republik Indonesia, untuk mempermudah pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal (18) ayat (1) yaitu bentuk dan susunan pemerintah ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan bersifat istimewa. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

daerah menganut kebijakan yang mendorong pengembangan otonomi daerah. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya hal ini dilakukan agar tujuan dari pemberian otonomi daerah betul-betul menyentuh akar persoalan yaitu mensejahterakan masyarakat di daerah.

Sebagaimana dalam pasal 18 Undang-undang 1945 amandemen ke dua dalam pasal ini menjelaskan :

1. Negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang
2. Pemerintahan daerah dan kabupaten kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan
3. Pemerintahan daerah kabupaten kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, daerah bersangkutan diberi kewenangan membuat peraturan daerah atau peraturan lain yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintah, tujuannya tidak lain untuk kelancaran membangun daerah sendiri.

Otonomi daerah sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia sampai saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah Indonesia berjalan dinamis pada saat ini menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

pemerintahan daerah yang mana otonomi daerah menganut prinsip seluas-luasnya nyata dan bertanggung jawab, guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka dibentuklah azas-azas umum pemerinytahan daerah yang terdiri dari :

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerinta dalam sistem kesatuan republik Indonesia, misalnya pada segi politik managemen pemerintahan, kultural, kepentingan pemerintahan pusat pembangunan
2. Desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerinta lkepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepa instansi pertikal diwilayah tertentu
3. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintahan kedaerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaen/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tudas tertentu.

Adapun bagian urusan wajib menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah pada pasal 14 yang menjadikan kewenangan pemerintan daerah untuk kabupaten /kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang tenaga kerjaan
9. Pasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertahanan
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
13. Pelayanan adminitrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan adminitrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah maka dalam peraturan pemerintahan daerah maka dalam Peraturan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Lingkungan Hidup
- d. Pekerjaan Umum
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan Pembangunan
- g. Perumahan
- h. Kepemudaan dan Olahraga
- i. Penanaman Modal
- j. Koprasi usaha kecil dan menengah
- k. Kependudukan dancatatan sipil
- l. Ketenaga kerjaan
- m. Ketahanan pangan
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- p. Perhubungan
- q. Komunikasi dan informatika
- r. Pertahanan
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negri

- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- v. Sosial
- w. Budaya
- x. Statistik
- y. Kearsipan
- z. Perpustakaan (PP No.38 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 2)

Kemudian menurut Peraturan Pemerintahan No.38 Tahun 2007 Pasal 7 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ayat 4 urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Parawisata
- f. Industri
- g. Perdagangan
- h. Ketransmigrasian

Dalam wilayah pemerintahan daerah terdapat desa yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asli pemerintahan. Dalam Undang-undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 200 dikatakan Desa diartikan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masing-masing setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah.

Selanjutnya dalam pasal 25 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian pasal 208 ditegaskan lagi tugas dan berkewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berdasarkan yang berdasarkan peraturan pemerintahan.

Sehubungan dengan ketentuan hukum tersebut maka pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan dikeluarkan PP tentang Desa, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagaimana lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombok pemberian layanan kepada masyarakat.

Sedangkan sebagaimana kesatuan masyarakat hukum adat, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan (hankam) yang stabil dan dinamis.

Pelaksanaan hak dan wewenang pemerintahan desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana satuan pemerintahan yang otonom desa punya kewenangan dalam mengelola sumber-sumber keuangan desa menurut pasal 212 Undang-undang

No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan sumber-sumber pendapatan desa yaitu :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga

Dari pasal 212 undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut salah satu sumber keuangan desa adalah bantuan dari pemerintahan provinsi dan pemda Kabupaten/kota sehubungan dengan dasar-dasar kekuasaan yang diberikan pemerintahan pada desa. Selanjutnya dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa maka dalam pasal 4 ayat 3 ditegaskan sumber pendapatan desa yaitu :

- a. Pendapatan asli Desa
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa
- e. Sumbangan pihak ketiga

Dari kesatuan SK Mendagri tersebut diatas diketahui bahwa salah satu sumber keuangan desa adalah ADD, dana ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang sebagian uang tersebut harus diritribusikan ke desa (minimal 10%).

Sesuai dengan surat keputusan Mendagri No. 37 tahun 2007 pasal 19 maka diketahui tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan diringkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dalam rangka mendukung program ADD maka pemerintahan daerah Kabupaten Palalawan telah mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Palalawan No. 19 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya dalam pasal 8 diterangkan bahwa ADD di pergunakan untuk :

1. Alokasi Dana Desa di pergunakan untuk
 - a. Belanja Oprasional
 - b. Belanja Publik
2. Belanja oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 40% dari ADD yang diterima Desa dipergunakan untuk :
 - a. Tujangan aparat pemerintahan desa
 - b. Tujangan anggota BPD
 - c. Oprasional sekretaris desa
 - d. Oprasional sekretaris BPD
 - e. Tunjangan lembaga kemasyarakatan dasa
 - f. Perjalanan dinas
 - g. Lain-lain pengeluaran rutin

3. Belanja publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 60% dari ADD digunakan untuk pelaksanaan pembangunan skala desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat
4. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan penggunaan yang diperuntukkan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program ADD tersebut maka melalui SK Mendagri No. 37 tahun 2007 pada pasal 24 ditegaskan bahwa pemerintahan kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pengelolaan Dana Alokasi Desa adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kabupaten/kota meliputi seperti yang tertera dalam pasal 25 :

- a. Memberikan pedoman dan pembibingan pelaksanaan ADD
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDes
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminitrasi keuangan desa

Salah satu kecamatan yang menjalankan dan membina program ADD adalah kecamatan Bandar Petalangan merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam

wilayah kabupaten palalawan. Adapun luas kecamatan Bandar Petalangan kurang lebih 219.990 ha² berdasarkan statistik tahun 2013 diwilayah kecamatan Bandar Petalangan memiliki penduduk sebanyak 14.883 jiwa yang terdiri dari perempuan 7.131 jiwa dan laki-laki sebanyak 7.752 jiwa dengan lima desa dan dua kelurahan.

Salah satu desa yang terdapat di kecamatan Bandar Petalangan adalah desa Lubuk Terap kecamatan Bandar Petalangan yang dalam pengelolaan ADD sudah berjalan kurang lebih lima tahun lalu dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan seperti penggunaan dana ADD untuk perangkat desa dan BPD serta biaya oprasional lainnya tapi untuk dana pembangunan guna pemberdayaan masyarakat belum terlihat maksimal. Berikut dapat dilihat anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015 pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 APBDes Desa Lubuk Terap anggaran tahun 2014

No	Rincian	Jumlah
1	Pendapatan Desa : Pendapatan Asli Desa Lain-lain Pendapatan Desa ✓ PPIDK Mandiri ✓ Bantuan Provinsi	Rp. _ Rp.400.000.000 Rp. 6.000.000
2	Alokasi Dana Desa ✓ TPAPD ✓ Kegiatan Pembangunan Fisik ✓ Selain TPAPD dan Kegiatan Pembangunan Desa	Rp.142.413.000 Rp. 39.000.000 Rp. 167.148.780
3	Belanja Desa ✓ Belanja Langsung ✓ Belanja Tidak Langsung	Rp. 77.823.660 Rp.238.313.000
4	Pembiayaan ✓ Penerimaan ✓ Pengeluaran	RP. _ Rp. 6.175
	Jumlah	Rp.1.038.279.495

Sumber : Kantor Desa Lubuk Terap 2015

Dari data diatas terlihat bahwa APBDes Desa Lubuk Terap pada tahun 2014 cukup besar. Kemudian berikut dapat dilihat beberapa program dari penggunaan ADD DI Desa Lubuk Terap kecamatan Bandar Petalangan yaitu :

Tabel 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Lubuk Terap anggaran tahun 2014

No	Uraian	Anggaran	Jumlah yang diminta Sekarang	Sisa Dana
1	2	3	4	5
1	Honorarium TPAPD	69.600.000	23.200.000	46.400.000
	Honor Keapala Desa	15.600.000	5.200.000	10.400.000
	Honor Sekertaris Desa	8.400.000	2.800.000	5.600.000
	Honor Kaur	16.200.000	5.400.000	10.800.000
	Honor Kepala Dusun	9.600.000	3.200.000	6.400.000
	Honor Ketua BPD	7.800.000	2.600.000	5.200.000
	Honor Anggota BPD	12.000.000	4.000.000	8.000.000
2	Honorarium Perangkat Desa	72.813.000	23.700.000	49.113.000
	Ketua LKMD	4.200.000	1.400.000	2.800.000
	Sekretaris, Anggota LKMD	18.900.000	6.300.000	12.600.000
	Honor RW	8.400.000	2.800.000	5.600.000
	Honor RT	19.800.000	6.600.000	13.600.000
	Honor Bendehara Desa	4.800.000	1.600.000	3.600.000
	Insentif PKPKD	6.000.000	2.000.000	4.000.000
	Insentif PKPKD	4.800.000	1.600.000	3.200.000
	Honor TOKK Desa	4.200.000	1.400.000	2.800.000
	Honor OPID Prifil Desa	1.413.000	-	1.413.000
	Honor PB Profil Desa	300.000	-	300.000
3	Belanja Barang dan Jasa	72.538.780	37.488.534	35.050.246
	Oprasioan Desa	12.500.000	6.225.000	6.275.000
	Benja Alat Tulis Kantor	1.530.000	800.000	730.000
	Belanja Matrai	600.000	210	390
	Fotocopy	570	190	380
	Biaya servis Kendaraan Dinas	900	450	450
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas	1.500.000	500.000	1.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
	Golongan III ke	4.400.000	2.200.000	2.200.000

	Kabupaten			
	Golongan II ke Kabupaten	3.000.000	1.875.000	1.125.000
4	Pemberdayaan BPD	8.000.000	3.825.000	4.175.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000	450.000	440.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat	4.860.000	2.250.000	2.610.000
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
	Golongan II ke Kabupa	2.250.000	1.125.000	1.125.000
5	Pemberdayaan LKMD	5.000.000	2.600.000	2.400.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000	350.000	330.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat	4.320.000	2.250.000	2.070.000
6	Pemberdayaan PKK	6.000.000	2.990.000	3.010.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000	200.000	220.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat	5.580.000	2.790.000	2.790.000
7	Pemberdayaan Karang Taruna	2.000.000		2000.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000		380.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.620.000		1.620.000
8	Pemberdayaa POSYANDU	5.000.000	2.530.000	2.470.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000	250.000	190.000
	Biaya Makan dan Minum kegiatan POSYANDU	4.650.000	2.280.000	2.280.000
9	Penyusunan POKJA	2.000.000	900.000	1.100.000
	Belanja Alat Tulis	480.000	200.000	280.000
	Belanja Fotocopy	140.000	100.000	40.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.380.000	600.000	780.000
10	Pengembangan TTG/WartegDes	2.000.000	950.000	1.050.000
	Belanja Alat Tulis	500.000	200.000	300.000
	Biaya Rapat	1.500.000	750.000	750.000
11	Pengembangan Tilawatil Qur'an	7.500.000	2.500.000	5.000.000
12	Peningkatan Kapasitas PEM Desa			
	Biya Studi Banding	10.000.000	10.000.000	
	BiayaRekening Listrik	1.439.780	888.534	551.246

	dan alat elektronik			
	Belanja alat kebersihan kantor	1.379.000	700	679
	Belanja Makan dan minum	5.760.000	2.880.000	2.880.000
	Belanja (Linmas)	3.150.000		3.150.000
	Belanja pemeliharaan Inpestaris kantor	810	500	310
13	Belanja Modal	94.610.000	8.600.000	86.010.000
	Pembelian Aplikasi pengelolaan keuangan Desa	5.000.000	5.000.000	
	Biaya Instruktur Pelatihan Aplikasi Keuangan	1.500.000	1.500.000	
	Biaya Pemeliharaan Aplikasi	3.600.000		3.600.000
	Belanja Umbul-umbul	10.000.000		10.000.000
	Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor			
	Belanja Trail Jendela Posyandu	2.100.000	2.100.000	
	Belanja Kipas Anggin	2.500.000		2.500.000
	Belanja Laptop	6.000.000		6.000.000
	Belanja Pengadaan Meubelir	3.900.000		3.900.000
	Belanja Kursi Kantor Desa	21.010.000		21.010.000
	Pembangunan Vaving Blok	21.010.000		21.010.000
	Sumur Bor di RT 06	12.000.000		12.000.000
	Pembangunan Pos Ronda 3 Unit	27.000.000		27.000.000
	Jumlah	309.561.780	92.998.534	216.573.246

Sumber : Kantor Desa Lubuk Terap 2015

Dengan melihat data tabel di atas maka diketahui banyaknya program yang dijalankan oleh pemerintahan desa Lubuk Terap dengan anggaran ADD namun program tersebut pada umumnya untuk kegiatan aparat desa dan lembaga yang ada di

desa yang diketahui keseluruhan ADDDesa Lubuk Terap Pada tahun 2014 sebesar Rp. 309.561.780.

Dari data di atas terlihat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bahwa masih sangat minim yang ada hanya untuk sumur bor dan pembangunan siskambling yang dimasukkan kedalam belanja modal pada ADD, itu juga kegiatannya tidak berjalan secara maksimal sampai saat ini karena pengawasan dari kepala desa terhadap pelaksanaan program ini hanya sebatas laporan saja. Adapun bentuk tanggung jawab pelaporan atau pertanggung jawaban yang disampaikan kepala desa pada akhir tahun kerjanya kepada BPD dan kepada Camat dengan melihat dari data tabel diatas maka dari APBDes yang ada.

Dalam hal ini yang ingin dilihat adalah keberadaan potensi desa dalam menunjang pembangunan desa seperti pendapatan desa, retribusi dana desa yang ada, seperti yang diketahui dari pelaksanaan dari ADD di kecamatan bantar petalalangan adalah tim pelaksana desa yang terdiri atas kepala desa, Sekrearis desa, kepala urusan dan staf, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pemegang kekuasaan adalah kepala desa kemampuan dan keterampilan para aparat desa merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana (ADD).

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di desa yang ada di kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan terutama di desa Lubuk Terab bahwa penggunaan alokasi dana desa tidak optimal karena penggunaannya terlihat

untuk kegiatan pemberdayaan keluarga desa belum ada maka dari itu terdapat fenomena atau gejala-gejala sebagai berikut :

1. Banyaknya kegiatan atau program yang dianggarkan oleh pemerintahan desa belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau dicapai keberhasilan dana yang diberikan hanya kepada lembaga desa sebesar Rp. 26.000.000,- dan tidak pada kegiatan pembangunan PPK dan LPM sedangkan untuk kegiatan pemerintahan desa bisa lebih besar, yang seharusnya kegiatan pemberdayaan masyarakat seharusnya mengikut sertakan dan melaksanakannya dengan masyarakat.
2. Penggunaan dana desa yang dikelola oleh kepala desa seperti penggunaan pemberdayaan lembaga desa sebesar Rp. 33.500.000,- dan pada kenyataannya tidak ada kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang ada di desa Lubuk Terab sehingga penggunaannya masih tidak sesuai dengan anggaran yang diperuntukkan untuk pemberdayaan yang ada.
3. Kurangnya pemberian informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa dan pemerintahan desa mengenai kegiatan yang akan dilakukan di Desa serta deskripsi atau gambaran umum kegiatan tersebut sehingga masyarakat tidak banyak mengetahuia program tersebut, contohnya adanya anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan sumur bor Rp.12.000.000,- dan pembangunan pos ronda sebesar Rp, 27.000.000,- dan diketahui yang mana kegiatan itu tidak sesuai sampai sekarang.

4. Tidak adanya perubahan dari kondisi masyarakat, sarana, dan prasarana serta pemerintahan desa melalui kegiatan yang terlihat dan dana yang bersumber dari ADD yang telah dianggarkan dan ada beberapa kegiatan belum dilaksanakan.

Berdasarkan latarbelakang dan fenomena yang telah dijelaskan kemudian keadaan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat di desa tentunya memerlukan Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai rancangan dan realisasi kegiatan dengan anggaran yang telah ditentukan begitu juga dengan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintahan pusat dan daerah yang mana dapat digunakan dalam hal biaya dan tunjangan oprasional pemerintahan desa dan belanja lainnya, tetapi khususnya di desa Lubuk Terab masih terdapat fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan ADD seperti kurangnya pengawasan BPD dan lembaga-lembaga Desa distribusi dana yang diberikan tidak tersebar secara merata.

Berdasarkan Fenomena dan gejala yang ditemukan dilapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meng evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan
2. Untuk mengetahui factor yang Menghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terutama dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bidang ini dimasa yang akan datang
3. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada pemerintahan Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pada dasarnya pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat, untuk melaksanakan pengaturan atau interaksi yang terjadi dalam masyarakat baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, dan pihak swasta dengan individu. (Dharma, 2004:33)

Apabila dilihat dari pemerintahan umum, bahwa pemerintahan dapat diartikan sebagai wewenang dan badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resin untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Termasuk dalam hal pelayanan baik mengenai administrasi maupun birokrasi. Selanjutnya menurut Rasyid (2000:59) secara umum fungsi pemerintahan adalah meliputi :

1. Pelayanan (*service*) yang membuahkan keadilan dalam masyarakat
2. Pemberdayaan (*empowerment*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat
3. Pembangunan (*depelopment*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat
4. Pengaturan (*regulation*) yang mencitakantatanan sosial yang baik diberbagaikelihood masyarakat

Didalam suatu pemerintahan yang baik, pemerintahan itu sendiri mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan

Di dalam pelayanan pemerintahan terhadap public ada beberapa macam yaitu :

- a. Pelayanan vertikal, pelayanan ini menjelaskan dan menerangkan hubungan antara atasan dan bawahan atau dapat kita artikan bahwa orang yang melayani (yang melakukan servis)
- b. Pelayanan horizontal, disini lebih di titik beratkan pelayanan terhadap pelanggan, dalam arti diantara satu dengan yang lain saling membutuhkan dan menghargai.
- c. Menurut Ndraha (2005:75) pelayanan pemerintahan pada saat paradigma Ilmu Pemerintahan berubah menjadi kybernologi berdasarkan anggapan dasar (disamping anggapan dasar lainnya) bahwa pihak yang diperintah itu adalah konsumen bahkan korban produk-produk pemerintahan, konsep pelayanan horizontal pun diterapkan dibidang pemeritahan. Pelayanan pemerintahan meliputi dua sisi yakni sisi individu, sisi ,masyarakat yang disebut pelayanan publik.

2. Pemberdayaan

Jenis pemberdayaan dan tujuannya :

- a. Pemberdayaan structural yang tujuannya membangun akses kompatibel antar sub-kulture

b. Pemberdayaan politik yang tujuannya untuk mengintegrasikan atasan kedalam kehidupan bangsa dan memampukannya memberikan sumbangan maksimal demi keamanan nasional.

3. Pembangunan

Sesuai dengan gelora pembangunan yang sedang dilancarkan oleh Bangsa dan Negara yakni semenjak orde baru maka tugas-tugas pemerintahan menjadi perluasan tuntutan masyarakat bagi pemerintah mauan kewajiban untuk berusaha memenuhinya sesuai dengan amanat yang diemban dari cirri-ciri proklamasi.

4. Pengaturan

Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. (Widjaja, 2007:67).

2. Konsep Otonomi Daerah

Secara filosofi otonomi daerah maksudnya adalah pemberdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya yang ada didaerah. Berdasarkan undang-undang No.32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Nurholis,2007: 30). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepala daerah baik Kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan Kesejahteraan rakyat (Widjaja,2007:133).

Untuk apa nanti mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan untuk yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme Serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja,2007:7-8).

Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Otonomi Luas

Yang Dinas set otonomi luas adalah kepala daerah diberikan Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengenai urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuk suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip otonomi nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah satu tugas dan wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi Daerah yang bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Abdullah,2007:5).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiamo(2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat ,(2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, dan (3) memperdayakan yang menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah menganut prinsip seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dan guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka dibentuk asas-asas umum pemerintahan daerah yang terdiri dari:

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia, misalnya pada segi politik, manajemen pemerintahan, kultural, kepentingan pemerintah pusat melakukan pembangunan
2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu .

3. Konsep Kebijakan

Dalam melaksanakan proses pembangunan, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk keputusan maupun perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar aparat pemerintah mempunyai dasar hukum dan melaksanakan segala aktivitas. Menurut Young dan Quinn (dalam

Suharto, 2006;44-45) ada beberapa konsep kunci yang memuat dalam kebijakan publik :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang dan agama kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum ,politis dan financial untuk melakukannya
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupa merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun,kebijakan publik biasa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dibezakan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan kerana tidak memerlukan tindakan tertentu
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang actor. kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam

kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang di arahkan tujuannya, sebagai memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang kehendaki .(Tangkilisan,2003;6). Kemudian menurut Amara kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. (Dalam Lubis,2007;19).

Selanjutnya Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu , disebut juga bahwa bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan. Syafiie (2005;154) kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan perhatian utama utama nya adalah public policy, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.

Menurut Easton kebijakan pemerintahan adalah kewenangan untuk alokasi nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah. (Dalam Lubis,2007;8).

Dengan kata lain dalam membuat suatu kebijakan pemerintah harus melihat dari aspek masyarakat sebagai yang menerima kebijakan tersebut agar kebijakan yang dibuat dan jalankan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Nasucha kebijakan publik adalah kewenangan pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. (dalam Posolong,2007;39).selanjutnya menurut Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang menyangkut tugas pemerintah. (dalam pasalong, 2007;39).

Dengan demikian kebijakan publik mempunyai multifungsi yaitu untuk menjadikan kebijakan itu adil dan seimbang dengan mendorong kemajuan kehidupan bersama dengan maksud pemerintah atau lembaga publik adalah sebagai perumusan, implementasi dan evaluasi dari satu kebijakan yang telah berjalan .

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan maka timbullah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan terdapat di daerah, walaupun kebijakan itu datangnya dari pemerintah pusat.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan . Yusuf (2000:3) menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen

dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang isinya adalah untuk perbaikan fungsi atau social manajemen lainnya yaitu perencanaan.

Adapun Anderson (dalam Winarno,2004:166) mengemukakan bahwa evaluasi adalah “ sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak. Evaluasi iadalah merupakan suatu proses yang mendasar daripada disiplin ketat dan tahap waktu maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasidapat diketahui hambatan atau kendala kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis,2005:169).

Sedangkanpekerjaan adalah proses sistematis untuk menganalisa kerjaan dalam rangka menentukan nilai relatif pekerjaan tersebut dalam organisasi. (Simamora,2004:478). Adapun menurut Manullang (2009:188) nilai yang dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actually result*) dengan alat pengukur (*standart*) yang sudah ditentukan titik ada berbagai model evaluasi,tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolak ukur adalah *Before*.
2. Model *Das Solen-Das sein*,yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya . Tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok *control*-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok *control* (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (di beri perlakuan).Tolak ukurnya adalah kelompok control,(Ndraha,2005:202)

Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar daripada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis, 2005:169).

Nurcholis (2005:67) menyatakan evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *Input, Process, Output, dan Outcome* (hasil), melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Suchman (dalam Winarno, 2014:233-234) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
 2. Analisis terhadap masalah
 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
 4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
 5. Menentukan apakah perubahan yang terjadi merupakan akibat dari kegiatan tersebut
 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan satu dampak.
- 5. Alokasi Dana Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa disebut, Nurcholis (2011:81). Sumber keuangan desa adalah bantuan dari pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten atau kota sehubungan dengan dasar-dasar kekuasaan yang diberikan pemerintah pada desa. Selanjutnya dalam Permendagri No.37 tahun

2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa maka dalam pasal 4 ayat 3 ditegaskan sumber pendapatan Desa yaitu:

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
3. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa
5. Sumbangan pihak ketiga

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), Nurcholis (2011:88-89). Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran bangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan tengah malam nilai-nilai keagamaan koma sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan kes swadaya and gotong royong masyarakat

- h. Meningkatkan pendapatan dasar dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUM Desa). Nurcholis (2011:89)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBdesa sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati atau walikota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen (untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Nurcholis (2011:90). Biaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

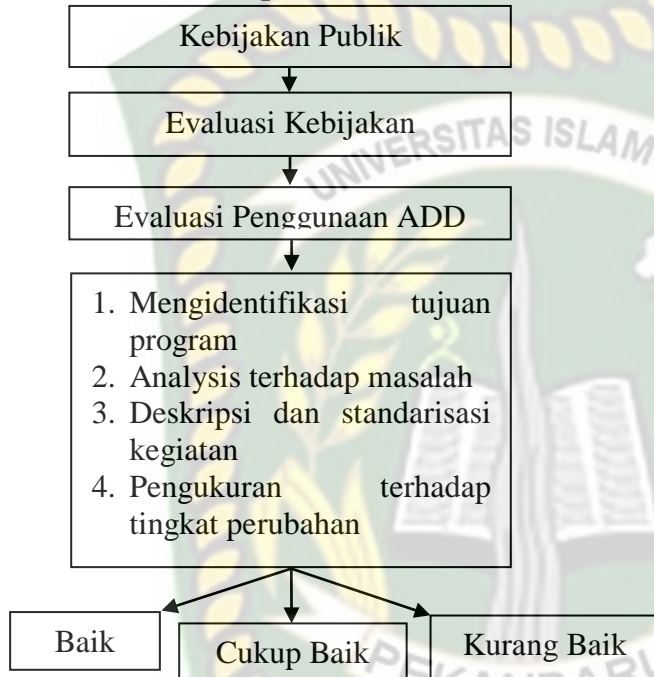
- a. Biaya perbaikan serta publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
- c. Biaya untuk penggandaan ketahanan pangan
- d. perbaikan lingkungan permukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. pengembangan sosial
- h. kegiatan lain yang dianggap penting. Nurcholis (2011:90)

B. Kerangka Pikir

Mengacu kepada permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai pengelolaan dan penggunaan alokasi dengan Desa merupakan terdapat beberapa teori yang dijadikan konsep penelitian. Kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang

penulis temukan di lapangan, maka penulis akan menggambarkan bagaimana pemahaman penulis dalam kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk terap Kecamatan bandar petalangan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Modifikasi Penulis, 2015

Dari kerangka pemikiran di atas penulis untuk menentukan 4 indikator evaluasi dari tempat yang tersedia yaitu mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah ,deskripsi dan standarisasi kegiatan dan pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi , karena 2 indikator lain nya yaitukalimah tiada sesuai dan menyatu pada indikator ke-4 dan indikator ke6 telah sesuai dengan 4 indikator lainnya.

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dan penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ,dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan public
2. Evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara standar dan fakta atau kenyataan dan analisis nya
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
4. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
5. Pembangunan desa adalah suatu proses perubahan dan perbaikan yang dilaksanakan secara sadar,perencana dan terarah dari suatu keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik yang ada dan berlangsung di desa
6. Kewangan Desa anda semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

7. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang bagian uang tersebut harus didistribusikan ke desa (minimal 10%)
8. Mengidentifikasi tujuan program ialah melihat perbandingan antara perencanaan mengenai kegiatan dan program-program yang disusun serta melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan
9. Analisis terhadap masalah ialah mengidentifikasi permasalahan yang muncul atau hambatan dari kegiatan yang telah dikerjakan serta memberikan alternatif penyelesaian permasalahan
10. Deskripsi dan standarisasi kegiatan ialah penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah ditentukan
11. pengukuran terhadap tingkat ialah usaha pemerintah dalam melihat dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga mengenai indikator serta item penilaian sebagai suatu batasan dari penelitian, operasional variabel dalam hal ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi

konsep ,variabele, indicator,item penilaian dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, yang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel II.1: Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Lubuk terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa disebut, Nurcholis (2011:81).	Evaluasi	1. Mengidentifikasi tujuan program	1. Perencanaan kegiatan	Baik
			2. Program kegiatan	Cukup Baik
			3. Tujuan dalam pelaksanaan	Kurang Baik
		2. Analisis terhadap masalah	1. Analisis kebutuhan	Baik
			2. Alternative	Cukup Baik
			3. Penyelesaian masalah	Kurang Baik
		3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan	1. Sosialisasi kegiatan	Baik
			2. Standar pelaksanaan kegiatan	Cukup Baik
			3. Metode kegiatan	Kurang Baik
		4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan	1. Dampak hasil kegiatan	Baik
			2. Dampak bagi pemerintahan dan masyarakat	Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2015

E. Teknik Pengukuran

Untuk memudahkan analisa data, maka peneliti terhadap variabel dan indikator dalam tingkat atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Pengukurandalam penganalisaan adalah dengan menggunakan persentase, yaitu katagori terlaksana dengan persentase $\geq 67\%$, untuk katagori cukup terlaksana antara $34\%-66\%$, sedangkan untuk katagori kurang terlaksana $\leq 33\%$.

Baik : Apabila Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan meliputi mengidentifikasi tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan dan pengukuran terhadap tingkat perubahan yang ditetapkan berada pada katagori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan meliputi mengidentifikasi tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan dan pengukuran terhadap tingkat perubahan yang ditetapkan berada pada katagori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan meliputi mengidentifikasi tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan dan pengukuran terhadap tingkat perubahan yang ditetapkan berada pada katagori $\leq 33\%$.

Adapun ukuran yang diberikan untuk masing-masing indikator, ditetapkan ukuran sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi tujuan program

Baik : Apabila hasil mengidentifikasi tujuan program mengenai

perencanaan kegiatan, program kegiatan dan tujuan kegiatan yang ditetapkan berada pada katagori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila hasil mengidentifikasi tujuan program mengenai perencanaan kegiatan, program kegiatan dan tujuan kegiatan yang ditetapkan berada pada katagori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hasil mengidentifikasi tujuan program mengenai perencanaan kegiatan, program kegiatan dan tujuan kegiatan yang ditetapkan berada pada katagori $\leq 33\%$.

b. Analisis terhadap masalah

Baik : Apabila analisis terhadap masalah mengenai analisis kebutuhan kegiatan, membuat leternatif dan penyelesaian masalah yang ditetapkan berada pada katagori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila analisis terhadap masalah mengenai analisis kebutuhan kegiatan, membuat leternatif dan penyelesaian masalah yang ditetapkan berada pada katagori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila analisis terhadap masalah mengenai analisis kebutuhan kegiatan, membuat leternatif dan penyelesaian masalah yang ditetapkan berada pada katagori $\leq 33\%$.

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Baik : Apabila dekripsi dan standarisasi kegiatan mengenai

penyuluhan atau sosialisasi kegiatan, standar pelaksanaan dan metode atau cara yang ditetapkan berada pada katagori \geq 67%.

Cukup Baik : Apabila dekripsi dan standarisasi kegiatan mengenai penyuluhan atau sosialisasi kegiatan, standar pelaksanaan dan metode atau cara yang ditetapkan berada pada katagori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila dekripsi dan standarisasi kegiatan mengenai penyuluhan atau sosialisasi kegiatan, standar pelaksanaan dan metode atau cara yang ditetapkan berada pada katagori \leq 33%.

d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan

Baik : Apabila Pengukuran terhadap tingkat perubahan mengenai dampak hasil kegiatan dan dampak bagi pemerintahan desa dan masyarakat yang ditetapkan berada pada katagori \geq 67%.

Cukup Baik : Apabila Pengukuran terhadap tingkat perubahan mengenai dampak hasil kegiatan dan dampak bagi pemerintahan desa dan masyarakat yang ditetapkan berada katagori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila Pengukuran terhadap tingkat perubahan mengenai dampak hasil kegiatan dan dampak bagi pemerintahan desa dan masyarakat yang ditetapkan berada pada katagori \leq 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Guna memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe survey. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut sugiono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi, dan sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan. Adapun pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian di desa ini karena jika dilihat perkembangan masyarakatnya yang cukup berkembang dengan baik dalam pembangunan desa yang membutuhkan pembenahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

C. Populasi dan Sample

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Urusan, Kepala Dusun.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sugyono (2001:81) apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, sampel mempunyai sifat, ciridan bentuk yang menggunakan seluruh populasi dan sifatnya mewakili untuk dipelajari dan dianalisis. Sehubungan dengan ini, dengan perkembangan cirri dari populasi berbeda, maka penulis menggunakan sampel seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Jumlah dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terab Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Ketua BPD	9	9	100%
3	Ketua LPM	11	11	100%
4	Sekretaris Desa	1	1	100%
5	Kepala Urusan	4	4	100%
6	Kepala Dusun	2	2	100%
7	Ketua Rukun Warga	4	4	100%
8	Ketua Rukun Tetangga	10	10	100%
Jumlah		42	42	100%

Sumber : Modifikasi Penulis, 2015

Dari uraian diatas, penulis simpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang disajikan sebagai objek untuk memperoleh data atau informasi tentang masalah yang akan diteliti. Jumlah sampel tersebut dianggap dapat mewakili jumlah

populasi yang ada dan diharapkan maupun memberikan keterangan yang akurat dalam penelitian ini.

D. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak dari jumlah dari populasi yang dinilai layak oleh peneliti untuk memberikan keterangan tentang data dan informasi yang penulis butuhkan. Untuk mendapat data yang dibutuhkan diambil sampel Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun yang diambil dari populasi, dikarenakan jumlah dari populasi tergolong sedikit maka penulis menggunakan sensus untuk menganalisis seluruh jumlah populasi, sehingga jumlahnya menjadi 42 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu :
 - a. Identitas responden
 - b. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
 - c. Analisis terhadap masalah
 - d. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
 - e. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
2. Data sekunder, adalah data pendukung yang yang diperoleh berkenaan penelitian berupa penjelasan umum seperti :
 - a. Struktur organisasi pemerintahan desa
 - b. Tugas dan Fungsi

c. Kegiatan Pembangunan

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Terab guna mendapatkan informasi dengan langsung mengadakan Tanya jawab langsung dengan Kepala Desa, Kadus, RT dan Sekdes berlandaskan pada tujuan penelitian.

2. Kuisisioner (angket)

Teknik ini merupakan suatu faktor yang berisikan serangkaian daftar pertanyaan mengenai subjek dan objek penelitian, kuisisioner sebagai suatu daftar pertanyaan telah dipersiapkan sejumlah alternative jawaban. Adapun tata cara penyebaran kuisisioner dengan cara menentukan responden penelitian yang terkait dengan objek penelitian, setelah itu peneliti meminta izin untuk memberikan kuisisioner dan pengarahan kepada responden dalam pengisian jawaban dan alasan, kemudian setelah responden mengisi peneliti mengambil kembali kuisisioner tersebut untuk dilakukan pengolahan data.

3. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan yang bersumber pada Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lubuk Terap.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara menerus dari

awal sampai akhir penelitian ini. Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun skunder selanjutnya penulis menggunakan teknik deskriptif yang mana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian yang dapat dijelaskan hasil penelitian secara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan kurang lebih memakan waktu satu tahun dimulai dari bulan maret 2015 hingga maret 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal dan waktu penelitian tentang Peranan kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Keterangan	Tahun 2019 Bulan/Minggu																				
		Maret				Mei				Agustus				Januari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	X	x	x																		
2	Perbaikan Proposal					x	x															
3	Penunjangan Pembimbing							x	x	x												
4	Bimbingan Proposal									x	x	x										
5	Ujian UP													x								
6	Revisi Proposal														x	x						
7	Quesioner															x						
8	Penelitian Lapangan																x	x	x			
9	Penyusunan Skripsi																	x	x	x		
10	Perbaikan Skripsi																		x	x		
11	Ujian Skripsi																			x		
12	Revisi Skripsi																				x	x

Sumber : Modifikasi Penulis, 2015

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Palalawan

Kabupaten Palalawan dengan luas 13.924.94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Palalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu : Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru, Pulau Ketam, Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, daratan rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik; air tanahnya payau kelembaban dan temperature udara agak tinggi.

- Sebelah Utara : kabupaten siak dan kepulauan meranti
- Sebelah Selatan : kabupaten kuantan seningi dan pasir penyu
- Sebelah Timur : kabupaten kuantan seningi dan kampar
- Sebelah Barat : kabupaten karimun Indragiri hilir

Kabupaten palalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan undang-undang RI No.53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri dari 4 wilayah kecamatan, yakni : Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit surat Dirjen PUOD No.134/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (Sembilan) kecamatan pembantu di Provinsi Riau, maka maka Kabupaten Palalawan dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) Kecamatan, yang

terdiri atas 4 Kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau N0.06 Tahun 2005, maka Kabupaten Palalawan terdiri atas 12 Kecamatan. Meliputi :

1. Kecamatan Bunut, dengan ibukota Panklan Bunut = 13.742 Jiwa
2. Kecamatan Langgam, dengan ibukota Langgam = 26.423 Jiwa
3. Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan ibukota Pangkalan Kerinci = 90.306 Jiwa
4. Kecamatan Pangkalan Kurask dengan ibukota Sorek Satu = 52.920 Jiwa
5. Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan ibukota Pangkalan Lesung = 29.035 Jiwa
6. Kecamatan Ukui, dengan ibukota Ukui Satu = 36.849 Jiwa
7. Kecamatan Kuala Kampar, dengan ibukota Teluk Dalam = 17.797 Jiwa
8. Kecamatan Kerumutan, dengan ibukota Kerumutan = 20.350 Jiwa
9. Kecamatan Teluk Maranti, dengan ibukota Teluk Maranti = 14.834 Jiwa
10. Kecamatan Palalawan, dengan ibukota Palalawan = 17.798 Jiwa
11. Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan ibukota Bandar Sei Kijang = 23.006 Jiwa
12. Kecamatan Bandar Petalongan, dengan ibukota Bandar Petalongan = 13.885 Jiwa

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 51,41% dari total PDRB Tahun 2012. Selain itu perekonomian Pelalawan juga didukung oleh sector pertambangan. Ada dua jenis pertambangan, yaitu minyak bumi dan gas bumi. Pada tahun 2012 produksi minyak bumi mencapai 572,69 ribu barrel dan gas bumi mencapai 5.716,76 ribu. Pada Kabupaten ini terletak Kawasan Industri Kampar yang

didalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produksi kertas yaitu PT.Riau Andalan Pulp and Paper.

B. Sejarah Singkat Desa Lubuk Terap

Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah sebuah desa yang dahulunya terletak di Empang Dua (Sekarang Desa Angkasa) namun Desa Lubuk Terap berpindah disekitar SUNGAI Simundam dan Sungai Sirih setelah beberapa tokoh terdahulu berinisiatif untuk pindah kedusun yang baru maka berpindahlah Desa Lubuk Terap dari Empang Dua ke lokasi Lubuk Terap yang sekarang.

Pemerintahan Lubuk Terap dahulunya adalah sebuah dusun yang dibawah naungan Desa Merbau Kecamatan Bunut namun seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat mengurus keperluan adminitrasi maka akhirnya Lubuk Terap mempunyai luas 91,5 km² dan jumlah penduduk sebanyak 3650 jiwa, adapun batas-batas wilayah Lubuk Terap meliputi :

- Sebelah Utara dengan Desa Merlung
- Sebelah Barat dengan Desa Pinang Gading
- Sebelah Selatan dengan Desa Penyambungan
- Sebelah Timur dengan Desa Merlung

Sebagai desa yang mayoritasnya dalah etnis melayu maka penduduk Lubuk Terap juga sangat ramah kepada para pendatang dan mudah diajak untuk bergaul sehingga banyak yang menjadikan desa Lubuk Terap sebagai kampong ke dua bagi

mereka yang pernah merasakan tinggal didesa Lubuk Terap. Kemudian fasilitas yang ada di desa Lubuk Terap, antara lain :

- Mesjid Nurul Iman
- TK Pembina Lubuk Terap
- SDN 001 Lubuk Terap
- SPBU Lubuk Terap
- Runah Makan, dll

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Terap

Gambar IV.1 Strktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Terap



Sumber : Modifikasu Penulis Tahun 2015

D. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Lubuk Terap

Dari bagan struktur organisasi pemerintah Desa Setako Raya di atas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menjelaskan :

1. Kepala Desa

Tugas Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa adalah :

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat
- 2) Kepala Desa mempunyai Wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
 - c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Meleaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- h. Melaksanakan dan bertanggungjawab pengelolaan keuangan Desa
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat Desa

- l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- m. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
- n. Mengembangkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban diatas, kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/wali kota, serta mengimpormasikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ,serta mengimpormasikan lapora penyelenggaraan Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan di sampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat 1(satu) kali dalam setahun.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Masing-masing tugas dan wewenang mereka akan di uraikan sesuai dengan jabatan/kedudukannya dalam organisasi desa sebagai berikut :

2. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dalam memimpin. Sekertaris Desa bertugas memimpin dan menjalankan adminitrasi tata usaha pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa, memberikan pelayanan teknis kepada seluruh organisasi desa dan masyarakat desa.

- a. Tugas dan fungsi Sekertaris Desa :
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Sekertaris Desa

- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Menyusun rencana APBDes
- g. Melaksanakan administrasi keuangan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- h. Mengantikan tugas dan fungsi kepala desa sementara apabila kepala desa berhalangan atau tidak ada di tempat (keluar kota).
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Bertugas membantu Sekertaris Desa dalam hal pemerintahan desa, ada pun tugasnya sebagai berikut :

- a. Kegiatan administrasi dan pencatatan sipil
- b. Kegiatan administrasi pertanahan
- c. Pencatatan monografi desa
- d. Kegiatan ketentraman dan ketertiban
- e. Penyelenggara buku administrasi dan keputusan desa
- f. Tugas-tugas lain yang diperintahkan atasannya

4. Kepala Urusan Pembangunan

Bertugas membantu Sekertaris Desa dalam hal pembangunan desa, ada pun tugasnya sebagai berikut :

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa

- b. Pencatatan sipil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
- c. Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi desa
- d. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa
- e. Tugas-tugas lain yang diperintahkan atasannya

5. Kepala Urusan Umum

Bertugas membantu Sekertaris Desa dalam hal urusan umum desa, ada pun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar
- b. Mempersiapkan dan mencatatn hasil rapat atau sidang dan kegiatan lainnya
- c. Memelihara dan menjaga alat-alat dan peralatan kantor
- d. Pelaksanaan ketertiban, kebersihan kantor dan bangunan desa lainnya
- e. Pengelolaan adminitrasi kepegawaian aparat desa
- f. Pencatatan investasi desa
- g. Mempersiapkan penerimaan tamu desa baik dinas maupun non-dinas
- h. Tugas-tugas lain yang diperintahkan atasannya

6. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati yang diusul oleh kepala desa.

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya
- b. Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa

- c. Membina dan meningkatkan swedaya masyarakat (peran masyarakat dalam bergotong royong)
- d. Melakukan kegiatan penyuluhan /sosialisasi program pemerintahan desa
- e. Tugas-tugas lain yang diperintahkan atasannya

E. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi dalam hal ini apa yang dimiliki oleh pemerintahn Desa Lubuk Terap yang salah satu dapat diketahui ialah sumber daya manusia yang merupakan bagian terpenting bagi organisasi yang merupakanperencana dan pelaksana kegiatan, adapun sumber daya organisasi pemerintahan desa antara lain:

Tabel. IV.1 Data Sumber Daya Pemerintahan Desa Lubuk Terap

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Ketua BPD	9
3	Ketua LPM	7
4	Perangkat Desa	8
5	Ketua Rukun Warga	14

Sumber : Kantor Desa Lubuk Terap, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemerintahan desa lubuk terap didukung oleh sumberdaya manusia yang dari segi jumlah telah cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari segi pembangunan dan kemasyarakatan di dukung oleh lembaga dengan jumlah anggota yang mencukupi.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Data-data yang dianalisis diperoleh melalui kuisisioner yang di tunjukkan kepada para responden penelitian yaitu perangkat Desa, Kepala dusun, LPM dan BPD Desa Lubuk Terap, maka lebih dahulu akan di paparkan hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang menjadi sampel penelitian ini, sehingga dengan penjabaran identitas dapat memberikan gambaran mengenai responden penelitian.

B. Identitas Responden

Sebelum pembahasan mengenai hasil penelitian dalam penelitian ini yang menjadi sample adalah Perangkat Desa, Kepala Dusun, LPM dan BPD Desa Lubuk Terap berjumlah 42 orang, Berikut ini uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkatan umur, pendidikan dan jenis kelamin.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin padahal penelitian ini digunakan untuk menggambarkan keadaan responden penelitian, untuk lebih jelasnya mengenai pengelompokan responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian

No	Jenis kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-laki	35	83%
2	Perempuan	7	17%
	Jumlah	42	100%

Sumber : Data Penelitian,2015

Tabel V.3 diatas menjelaskan bahwasanya jumlah responden pada penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 35 orang dengan persentase 17%. Kemudian untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

2. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang di berikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun tingkat umur responden penelitian-penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 adalah sebagai berikut :

Tabel V.2. Distribusi Responden penelitian berdasarkan Tingkat Umur Responden.

No	Umur	Populasi	Persentase
1	<30 tahun	11	26%
2	30-39	21	50%
3	40-49	8	19%
4	>50 tahun	2	5%
	Jumlah	42	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2015

Berdasarkan tabel V.1. diatas dapat diketahui tingkat umur pada mendominasi keseluruhan responden yang merupakan tingkat umur 30 sampai dengan 39 tahun

dengan jumlah 21 orang atau 50 % yang mana merupakan tingkat umur dewasa dan dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya telah memiliki pengalaman yang telah cukup .

3. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap pekerjaan dan pengetahuan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula pengetahuan yang di miliknya. Maka untuk pengelompokkan tingkat pendidikan responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3.Distribusi Responden penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Populasi	Persentase
1	SD	5	12%
2	SMP	7	17%
3	SMA	26	62%
4	Diploma	1	2%
5	Sarjana	3	7%
6	Strata 2	0	0%
		42	100%

Sumber:Data Penelitian,2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden yang mendominasi ialah tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat dengan jumlah 26 orang atau 62%. Dengan begitu dapat diketahui bahwa responden penelitian ini secara umum memiliki pengetahuan dan pendidikan yang mencukupi untuk disajikan responden penelitian.

B. Hasil dan Perpustakaan

Setelah melakukan penyebaran kuisisioner, melakukan wawancara dan observasi mengenai penggunaan Alokasi dana desa di Desa Lubuk Terap, maka dari tanggapan

responden penelitian yang terdiri dari pemerintah desa dan kelembagaan yang ada di desa mengenai evaluasi penggunaan ADD yang terdiri dari 4 indikator, maka akan dibahas secara satu persatu.

1. Mengidentifikasi Tujuan Program

Mengidentifikasi tujuan program ialah melihat perbandingan antara perencanaan mengenai kegiatan Program-program yang disusun serta melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya harus ada tujuan yang kongkret dan penilaian yang dilakukan juga harus dapat memperbaiki kegiatan yang dilaksanakan sekarang dan yang akan datang. Adapun beberapa perencanaan kegiatan pemberdayaan lembaga dan pembangunan skala desa dengan bersumber alokasi dana desa yang belum terlaksana antara lain:

- Pemberdayaan BPD sebesar Rp. 8.000.00,-
- Pemberdayaan LKMD sebesar Rp. 5.000.000,-
- pemberdayaan karang taruna sebesar Rp. 2.000.000,-
- pengembangan Tilawatil Qur'an Sebesar Rp. 7.500.000,-
- Pengadaan sumur bor sebesar Rp. 12.000.000,-
- Pembangunan pos ronda 3 unit Rp. 27.000.000,- (**sumber:Alokasi dana Desa**

Lubuk Terap, 2015)

Dari perencanaan kegiatan tersebut keseluruhannya merupakan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur skala desa, yang merupakan pembangunan untuk meningkatkan kegiatan kelembagaan di desa dan kehidupan masyarakat di desa, adapun program-program yang untuk peningkatan kehidupan masyarakat desa yaitu:

- Pemberdayaan lembaga desa meliputi dana operasional dan kelengkapan kantor
- Pengembangan kegiatan keagamaan masyarakat Desa
- Pengadaan air untuk warga,
- Ketentraman dan ketertiban. (Sumber: Profil Desa Lubuk Terap,2015)

Dari program-program di atas terlihat bahwa Desa Lubuk Terap memprioritaskan kegiatan pemerintahan desa pada pemberdayaan lembaga dan pembangunan infrastruktur desa, serta lingkungan yang nyaman dan tetram. Setelah menyebarkan kuesioner dan melakukan pengumpulan data mengenai indikator mengidentifikasi tujuan program, maka tanggapan dari responden penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel v. 4. Distribusi jawaban Responden penelitian mengenai mengidentifikasi Tujuan Program

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan Kegiatan	28 (67%)	14(33%)	0	42
2	Program-program	28 (67%)	14(33%)	0	42
3	Tujuan yang jelas dan teratur	8(19%)	34(81%)	0	42
Jumlah		64	64	0	126
Rata-rata		21	21	0	42
Persentase		50%	50%	0	100

Sumber : Data olahan peneliti 2016

Dari tabel diatas bahwa tanggapan responden penelitian adalah sama besar antara cukup baik dan baik yaitu kategori baik sebanyak 21 responden dan cukup baik dengan rata- rata 21 responden (50%), tapi dari tanggapan responden kebanyakan tidak mengetahui mengenai adanya program tujuan digunakannya ADD yang

responden ketahui kebanyakan dana tersebut belum semuanya digunakan untuk operasional kelembagaan desa dan pembangunan di desa.

Dari tanggapan responden diatas terlihat memang adanya program yang disusun oleh pemerintah Desa Lubuk Tersp, karena penggunaan Alokasi Dana Desa Lubuk Terap didominasi pada honorarium perangkat desa dan bantuan kepada lembaga yang ada di desa tetapi pada kenyataannya belum dilaksanakan dengan maksimal seperti yang diketahui pada BPD, LKMD dan karang taruna belum mendapatkan dana operasional atau pemberdayaan lembaga, dan terdapat beberapa pembangunan fisik yang direncanakan dalam penggunaan Alokasi Dana desa seperti pembangunan sumur bor dan pembangunan 3 pos ronda yang ternyata sampai saat ini belum terlaksana dengan semestinya.

Sedangkan tujuan dari pembangunan pos ronda adalah sebagai penjagaan ketentraman dan ketertiban serta keamanan di wilayah desa kemudian pembangunan sumur bor secara umum dapat dipergunakan untuk penduduk yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari

Perencanaan yang di lakukan oleh pihak pemerintah Desa hanya pada kegiatan belanja tidak langsung, honorarium perangkat desa dan belanja barang dan jasa dan juga penghasilan perangkat Desa, anggota BPD, ketua LKMD dan kelembagaan di Desa kemudian pada operasional pemerintah desa mengenai perlengkapan kantor, yang termasuk biaya yang langsung yang mana seharusnya belanja publik atau pembangunan skala desa dan pemberdayaan di masukkan pada dana Alokasi dana desa.

Maka dari hal tersebut tidak terlihat adanya perencanaan yang matang mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah Desa Lubuk Terap dalam penggunaan Alokasi dana Desa, kemudian informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan kepala Desa Lubuk Terap mengenai indentifikasi tujuan program, sebagai berikut:

“Tentunya setiap kegiatan memiliki tujuan yang mana memang dalam Pelaksanaan penggunaan ADD belum secara rinci lagi kita susun, tetapi Penggunaan dana memang kita sosialisasikan secara jelas dan tahap rencana. Juga mengikut sertakan lembaga lain, karena ADD juga akan membantu Lembaga tersebut”. **(Wawancara dengan Bapak Khairul Saleh,5 januari 2016).**

Dari hasil kuisioner dan wawancara mengenai program dan tujuan program dapat diketahui bahwa perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Desa mengenai anggaran Alokasi dana desa didominasi dan digunakan untuk keperluan tunjangan perangkat desa dan keperluan operasional Kantor Desa, tetapi tidak adanya kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat dan belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan fisik mengenai pos ronda dan sumur bor yang direncanakan yang dibuat oleh pemerintah Desa, sehingga penggunaan alokasi dana desa belum memenuhi kebutuhan akan belanja publik yaitu pembangunan skala desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian dari hasil observasi yang penulis lakukan memang terlihat beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa melalui dana ADD yang sesuai

dengan laporan yang penulis dapatkan seperti kelengkapan Kantor Kepala Desa, Bantuan kepada pemuda, LKMD, BPD kemudian kegiatan pengembangan keamanan serta pembangunan sumur bor dan siskamling, dari hasil tanggapan responden penelitian, wawancara dan hasil observasi untuk indikator mengidentifikasi tujuan program dalam kategori cukup baik.

2. Analisis terhadap masalah

Analisis terhadap masalah ialah mengidentifikasi permasalahan yang muncul atau hambatan dari kegiatan yang telah dikerjakan serta memberikan alternative penyelesaian permasalahan. Ini artinya bahwa dalam setiap penyusunan kegiatan yang dilakukan haruslah melihat permasalahan serta menyelesaikan permasalahan. Adapun beberapa analisis kebutuhan pembangunan di Desa Lubuk Terap antara lain:

1. Peningkatan jalan lingkung
2. Pembangunan Gedung Serba Guna
3. Pembangunan Jembatan Sungai Sirih
4. Pembangunan Box Culvert
5. Pengadaan Sumur bot
6. Pemberdayaan kelembagaan desa
7. Pengembangan kegiatan keagamaan
8. Pembangunan pos ronda 3 unit
9. Pembangunan Musholla Desa Lubuk Terap
10. Pembangunan darinase,

11. Penerangan jalan. (**Sumber: profil desa dan Musrenbangdes Lubuk Terap,2015**)

Dari beberapa kebutuhan Desa Lubuk Terap yang didapatkan berdasarkan Rapat yang dilaksanakan Kepala Desa dengan Lembaga dan masyarakat, tetapi hanya setengah dari kebutuhan tersebut yang dijadikan prioritas untuk diteruskan. Maka dari itu diharapkan penggunaan ADD dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah melakukan pengumpulan data mengenai indikator analisis terhadap masalah, maka tanggapan dari responden penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V. 5. Distribusi Jawaban Responden penelitian Mengenai Analisis Terhadap Masalah

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Analisis kebutuhan oprasional	0	42(100%)	-	42
2	Alternatif-alternatif penyelesaian	0	28(67%)	14(33%)	42
3	Kegiatan telah menyelesaikan permasalahan	0		34(81%)	42
Jumlah		0	78	48	126
Rata-rata		0	26	16	42
Persentase		0	62%	38%	100

Sumber : Data olahan peneliti 2016

Dari tabel diatas dilihat bahwa jawaban responden yang mendominasi ialah cukup baik dengan rata-rata 26 (62%) dan kemudian kurang baik rata-rata 16 (38%), tanggapan dari beberapa responden kebutuhan operasional selalu diajukan kepada pemerintah desa untuk mendapat bantuan kelengkapan kantor, kemudian tidak ada alternatif penyelesaian masalah.

Seperti yang diketahui dari tanggapan responden penelitian yang menyatakan tidak adanya analisis terhadap kebutuhan, sedangkan dalam mengajukan dana ADD tentunya terlebih dahulu harus merampungkan rincian penggunaan dan totalnya sehingga dana yang dikeluarkan terlihat untuk apa saja, seperti diketahui dari melihat kebutuhan masyarakat ialah kebutuhan akan drainase, jembatan dan perbaikan jalan yang berlobang kemudian pengadaan sumur bor serta siskamling yang mana diketahui bahwa terdapat permasalahan kekurangan air dan pelanggaran keamanan dan ketertiban di wilayah desa yang terjadi akhir-akhir ini.

Hambatan penyelenggaraannya terdapat beberapa masalah yang terlihat seperti banyaknya kebutuhan masyarakat di desa yang belum dipenuhi, sehingga tuntutan masyarakat semakin banyak dan dapat menjadi suatu konflik maka dari itu dilakukanlah rapat untuk menentukan prioritas pembangunan fisik serta kegiatan pemberdayaan lainnya seperti pembangunan sumur bor dan pos ronda kegiatan keamanan yang rutin di desa, hal ini dilakukan pada Musrenbangdes tentunya dapat diselesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada beberapa alternatif bila terjadi hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan dengan Sumber ADD antara lain:

1. Dengan sumber swadaya masyarakat
2. Pengadaan tong air sementara
3. Pembangunan Pos Ronda Non permanen

Sehingga dari beberapa alternatif tersebut dapat sementara memenuhi kebutuhan akan masyarakat desa, adapun kegiatan yang telah menyelesaikan permasalahan ialah pengadaan pos ronda yang baru hanya satu unit tetapi sudah dapat di gunakan

oleh warga untuk kegiatan ronda malam , Kemudian goyang royong warga desa untuk membersihkan parit dan mencegah banjir atau air meuap dari parit.

Mengenai kekurangan dana terjadinya hambatan dalam pembangunan , sehingga segala sesuatu dapat diperkirakan dan di selesaikan dengan cepat. Kemudian informasi yang penulis dapat melalui wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Terap mengenai analisis terhadap masalah, ia sebagai berikut:

“ Kalau pembangunan ADD lebih baik kepada permasalahan operasional Kantor Kepala Desa dan perangkat desa , ini yang menjadi permasalahan dalam beberapa waktu sehingga kami dari pihak pemerintah Desa memberi bantuan untuk supaya lembaga desa aktif dalam membantu pemerintah desa juga”.
(Wawancara dengan Bapak Khairul 5 Januari 2016).

Kemudian dari hasil observasi yang penulis lakukan memang terlihat kebanyakan dana ADD Desa Lubuk Terap dilakukan untuk operasional pemerintah Desa dan Lembaga yang ada di Desa dan untuk pembangunan serta kegiatan yang menuju kepada masyarakat dalam jumlah yang sedikit, seharusnya permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan Desa seperti kekurangan sumur umum, pos kamling dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan data ini.

Maka dari itu Pemerintah desa apabila tidak dapat mewujudkan keinginan masyarakat dalam pembuatan sumur bor dapat memberikan bantuan tong air yang diletakkan pada fasilitas umum dan pembuatan pos ronda dari swadaya masyarakat agar tidak dapat membebankan pada lokasi dana desa.

Dari hasil observasi juga diketahui beberapa bahwa beberapa kebutuhan masyarakat akan pembangunan skala desa belum seluruhnya dapat dilaksanakan melalui anggaran melalui anggaran Alokasi dana desa , seharusnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah desa berasal dari kebutuhan masyarakat desa, sehingga dari hasil tanggapan responden penelitian, wawancara dan observasi untuk indikator analisis terhadap masalah dalam kategori cukup baik.

3. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan

Deskripsi dan standarisasi kegiatan ialah penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah ditentukan, dalam hal ini pemerintah Desa Lubuk Terap diharuskan memiliki deskripsi atau gambaran mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan kemudian ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan sesuai dengan rencana yang di Tentukan .Untuk menginformasikan kepada masyarakat dilakukan lah sosialisasi kegiatan berupa :

1. Pengumuman dari pihak Kepala Desa Lubuk kepada Ketua RW/RT
2. Himbauan melalui papan pengumuman Desa dan Mesjid
3. Pengumuman melalui mesjid
4. Melalui musyawarah yang di di lakukan oleh pemerintah Desa dan lembaga serta masyarakat .(Sumber:Profil Desa Lubuk Terap, 2015)

Sehingga sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi suatu program, karena penyebaran informasi dapat membantu keberhasilan Kegiatan tersebut. Setelah menyebarkan kuesioner dan melakukan pengumpulan data mengenai

indikator Deskripsi dan Standarisasi kegiatan, maka tanggapan dari responden penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.V.6. Distribusi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Deskripsi Dan Standarisasi Kegiatan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi kegiatan	8 (19%)	20(48%)	14(33%)	42
2	Sosialisasi standar Pelaksanaan	8 (19%)	20(48%)	14(33%)	42
3	Standar pelaksanaan	-	28(67%)	14(33%)	42
4	Metode pelaksanaan metode pelaksanaan	8 (19%)	27(64%)	7(17%)	
Jumlah		24	95	49	
Rata-rata		6	24	12	42
Persentase		014%	58%	28%	100

Sumber : Data olahan peneliti 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa tanggapan responden penelitian dengan variasi jawaban yang berbeda untuk kategori baik dengan rata-rata 6 (14%), cukup baik dengan rata-rata 24 (58%) kemudian untuk kurang baik dengan rata-rata 12 (28%), terdapat beberapa tanggapan dari responden yaitu alasan pengambilan jawaban memang terdapat sosialisasi kegiatan yang akan di laksanakan dengan bersumber dari ADD tetapi mengenai standar pelaksanaan dan metode pelaksanaan tidak ada. Dari tanggapan responden tersebut diketahui bahwa pemerintah Desa memberikan informasi kepada lembaga dan masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak memberikan standar pelaksanaan hal ini penting untuk menjadi ukuran dari hasil pelaksanaan sehingga segala dana yang diberikan dan dikeluarkan menghasilkan kegiatan dan mencapai tujuan Telah ditentukan. Kemudian informasi

yang penulis dapat melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Lubuk Terap mengenai Deskripsi dan Standarisasi kegiatan, sebagai berikut:

“Kalau gambaran itu telah dilakukan pada rapat yang kami lakukan bersama lembaga kemudian dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman di kantor kepala Desa dan masjid, untuk standarisasi belum sampai serinci itu”.(Wawancara dengan Bapak Khoirul Saleh, 5 Januari 2016)

Selanjutnya dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui memang sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Melalui rapat dilakukan antar kepala Desa, perangkat lembaga kemudian masyarakat kemudian hasil rapat akan diumumkan melalui papan pengumuman kantor desa dan masjid di desa. Dari hasil tanggapan responden penelitian wawancara dan observasi indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan dalam kategori cukup baik.

4. Pengukuran Terhadap Tingkat Perubahan

Pengukuran pengukuran terhadap tingkat ialah Usaha pemerintah dalam melihat dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengenai dampak yang dasarnya oleh masyarakat dan pemerintah, ini berarti dalam satu kegiatan pasti terdapat hasil yang baik dan hasil yang buruk Apakah seluruh kegiatan dapat bermanfaat untuk masyarakat dapat dirasakan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. maka dari itu pengukuran dilakukan untuk mengetahui sampai dimana hasil dari kegiatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan. Setelah menyebarkan kuesioner dan melakukan pengumpulan data mengenai indikator

pengukuran terhadap tingkat perubahan, maka tanggapan dari responden penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.V.7. Distribusi jawaban responden penelitian mengenai pengukuran terhadap tingkat perubahan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dampak perubahan yang	8 (19%)	27(64%)	7(17%)	42
2	Dampak bagi pemerintah	0	35(83%)	7(17%)	42
3	Dampak bagi masyarakat	0	35(83%)	7(17%)	42
Jumlah		8	97	21	
Rata-rata		3	32	7	42
Persentase		7%	76%	17%	100

Sumber: data Olahan penelitian ,2016.

Dari dari tabel di atas terlihat bahawa tanggapan responden yang terbanyak pada kategori cukup baik dengan rata-rata 32 atau dalam dari tabel di atas terlihat bahawa tanggapan responden yang terbanyak pada kategori cukup baik dengan rata-rata 32 atau (70%) kemudian untuk kategori kurang baik dengan rata-rata 7 atau 17% dan kategori baik dengan rata-rata 3 atau 7%, kemudian didapatkan alasan pengambilan jawaban dari responden penelitian antara lain bahwa dengan bantuan Alokasi Dana Desa dapat melengkapi perlengkapan Kantor Kepala Desa, BPD, LKMD dan karang taruna, kemudian dapat menyelenggarakan acara keagamaan di Desa serta buat Sumur bor dan memperketat keamanan Desa melalui pos ronda.

Dari tanggapan responden penelitian di atas terlihat bahwa dari segi hasil kegiatan dengan menggunakan sumber ADD Desa Lubuk Terap memang dirasakan bahwa dampak positif bagi masyarakat antara lain:

- Meningkatkan kelengkapan kantor keagamaan di Desa Lubuk Terap
 - Meningkatkan dapat merasakan suasana yang tenang dan tertib melalui kegiatan siskamling
 - Masyarakat mendapatkan akses jalan masuk ke desa yang baik
 - Serta masyarakat dapat menikmati penerangan jalan Desa
- Kemudian dampak positif bagi pemerintah antara lain:
- Pertambahan kelengkapan kantor sebagai operasional dan honor perangkat desa semakin baik
 - Membantu Lembaga di desa untuk aktif dalam membantu pemerintah Desa untuk dapat menjalankan tugas kelembagaan masyarakat Desa
 - Pertambahan honor bagi perangkat Desa dan belanja operasional desa dapat meningkatkan kemampuan Kepala Desa dan perangkat desa melalui kegiatan studi banding sebagai kegiatan peningkatan kapasitas

Dari beberapa dampak positif di atas terlihat bahwa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa kegiatan pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa, menghidupkan kembali lembaga yang ada di desa dan Membantu masyarakat. Informasi yang didapatkan selanjutnya melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Lubuk Terap mengenai pengukuran terhadap tingkat perubahan, yaitu:

“dengan bantuan ADD kepala Desa Lubuk Terap ini bisa membantu menambah honor kepada perangkat desa, memberi bantuan kepada lembaga Desa,

sehingga dengan begitu akan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja dan membantu masyarakat, Kemudian untuk dan untuk pembangunan baru dapat terlaksana pada dua tahun ini".(wawancara dengan Bapak Khairul Saleh 2016)

Kemudian dari hasil observasi memang terlihat tingkat kehadiran perangkat desa Lubuk terap pada kantor kepala Desa cukup tinggi dan dengan Bantuan Operasional perlengkapan kantor kepala Desa Lubuk terap menjadi lebih lengkap, kemudian apabila sumur bor dan pos ronda telah selesai dibangun tentunya akan membantu masyarakat dari pemenuhan air untuk keperluan sehari-hari dan masyarakat desa juga dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di desa.

Maka dari kegiatan yang bersumber pada Alokasi Dana Desa yang dilakukan terdapat dampak positif bagi masyarakat Desa dan operasional Kantor Kepala Desa mengenai peralatan untuk mengerjakan tugas. Dari hasil tanggapan responden penelitian, dengan kepala desa dan observasi yang penulis lakukan untuk indikator pengukuran terhadap tingkat perubahan dalam kategori cukup baik.

Setelah melakukan pembahasan indikator salah satu persatu lakukan penghitungan kembali dengan mengumpulkan tanggapan responden penelitian menjadi satu tabel yaitu rekapitulasi seluruh tanggapan responden penelitian mengenai menjadi keempat indikator evaluasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.V.8.Rekapitulasi Jawaban Penelitian Mengenai Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengidentifikasi tujuan Program	21(50%)	21(50%)	0	42
2	Analisis terhadap masalah	0	26(62%)	16(38%)	42
3	Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan	6 (24%)	24(58%)	12(28%)	42
4	Pengukuran terhadap tingkat Perubahan	3 (7%)	32(76%)	7(17%)	42
Jumlah		30	103	35	
Rata-rata		7	26	9	42
Persentase		17%	62%	21%	100

Sumber: data Olahan penelitian,2016.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tanggapan responden penelitian didominasi pada kategori cukup baik dengan rata-rata 26 atau 62%, Kemudian untuk kategori kurang baik dengan rata-rata 9 atau 21 serta baik dengan rata-rata 7 atau 17%, sehingga dari hasil tanggapan responden penelitian yang terdiri dari Pemerintah desa dan lembaga yang ada di desa Lubuk terap, kemudian wawancara dengan kepala desa Lubuk terap dilengkapi dengan observasi dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa di Lubuk terap Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan dalam kategori cukup baik.

B. Faktor penghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Setelah setelah melakukan penelitian mengenai evaluasi penggunaan alokasi dana Desa di Desa Lubuk terap Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan , maka didapatkan hambatan yang terjadi meliputi :

1. Program -program yang dirumuskan dan disusun oleh Pemerintah Desa belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara maksimal, dan baik, kurangnya sosialisasi kegiatan dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak banyak yang mengetahui
2. Kegiatan dan program yang dilaksanakan bukan berdasarkan masalah atau kebutuhan yang terjadi di Desa melainkan melainkan keinginan pemerintah Desa sehingga permasalahan yang sebenarnya ada di desa belum dapat diselesaikan
3. Tidak adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan sehingga belum jelasnya rincian dana yang diberikan kepada lembaga yang ada di desa untuk kegiatan apa saja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan kuisisioner, wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul data dan responden penelitian yang terdiri dari perangkat desa dan lembaga Desa dapat diketahui dan diambil kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam kategori cukup baik.
2. Adapun beberapa hambatan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - Tidak adanya program-program yang di rumuskan oleh pemerintah Desa secara jelas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan hanya langsung kepada kegiatannya saja
 - Kegiatan yang dilaksanakan bukan berdasarkan masalah sehingga permasalahan yang sebenarnya ada di Desa belum dapat di selesaikan
 - Tidak adanya standart dalam pelaksanaan kegiatan sehingga belum jelasnya rician dana yang diberikan kepada lembaga yang ada di Desa untuk kegiatan apa saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan maka dapat di sarankan, sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintahan Desa Lubuk Terap untuk menyusun program – program pemerintah Desa secara jelas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat
2. Kepada pihak pemerintah Desa Lubuk Terap untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan masalah dan kebutuhan sehingga permasalahan yang sebenarnya ada di Desa dapat di selesaikan
3. Kepada pihak pemerintah Desa Lubuk Terap untuk dapat menyusun standart pelaksanaan kegiatan sehingga rician dana yang diberikan kepada lembaga yang ada di Desa dan sasarannya juga untuk kegiatan apa saja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Dharma, Setiawan Salam. 2004. "Manajemen Pemerintah Indonesia". Jakarta: Djembatan.
- Ibrahim, Amin. 2004. "Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)". Cetakan 1, Bandung : Mandar Maju.
- Lubis, Solly. 2007. "Kebijakan Publik". Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2003. *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Manullang, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjahmada University. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah*. Jurnal. Jakarta
- Ndraha, Tahuluduhu, 2003. *Kybernologi" Ilmu Pemerintahan Baru"*. Jakarta. Rineka Cipta
- Ndraha, Talizuduhu. 2005. "Kybernology: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan ". Jakarta: Rinekab Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan otonomi daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Pasalong, Harbani. 2007. "Teori Administrasi Publik". Bandung : Alfabeta.
- Rasyid, Ryass. 2000. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta. mutiara sumber Widya.
- Simamora, Hendry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ketiga*. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Singarimbun, Masri, 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES

- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *"Sistem Administrasi Negara"*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung .
- Suharto, Edi. 2006. *"Analisis Kebijakan Publik"*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkisan, Nogi Hasel. 2003. *"Kebijakan Publik Untuk Pimpinan Berwawasan Internasional"*. Yogyakarta:Balairung & Co Yogyakarta.
- Widjaja, Haw. 2007. *"Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom"*. Jakarta: Rajawali pres.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan publik, teori, proses dan studi kasus, CAPS*. Yogyakarta.
- Yusuf, Farida. 2000, *Evaluasi Program*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Dokumentasi**
- Profil Desa Lubuk Terap
- Alokasi dana Desa Lubuk Terap 2015
- Laporan Hasil Musrenbangdes Lubuk Terap.